
Impilikasi Dana Otsus dalam Mengurangi Kemiskinan di Papua: Dengan *Error Correction Model* (ECM)

Ully Vidriza ¹, Daniel Ananta Talmera ²

Email : ullyavidriza@upnvj.ac.id ¹, danielananta10@gmail.com ²

Fakultas Ekonomi dan Binsnis UPN Veterean Jakarta ¹

Kanwil BPN Provinsi Papua, Kementerian ATR/BPN ²

Abstract

Special Autonomy funds is a special revenue post for the implementation of special autonomy which amount is equivalent to 2% of the ceiling of National General Allocation Fund for 25 years, which is mainly intended for financing education and health. The distribution of special autonomy funds is expected to improve the community's economy in order to realize justice in the concept of regional product management, increase community welfare, and empower human resources. However, practically there are some discrepancies between the expectation and reality. Ironically, amid the abundance of Papua Special Autonomy funds in the last two decades, poverty is still the main problem. This study aims to analyze the impact of special autonomy funds on poverty alleviation in Papua, with the assumption that the special autonomy funds are fully distributed using Error Correction Model Analysis. The results showed that the Special autonomy funds significantly reduce the Number of Poverty in short-run and long run.

Keywords: *Governance; Special Autonomy funds; Poverty; Correction Model Analysis*

PENDAHULUAN

Dalam salah satu pasal yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara harus mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah khusus atau daerah istimewa. Reformasi di Indonesia memberikan peluang bagi munculnya pemikiran dan kesadaran baru untuk memecahkan masalah utama bangsa Indonesia dalam penataan kehidupan berbangsa dan bernegara agar lebih baik (Baharudin, 2016). Maka oleh sebab itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPRRI) membuat ketetapan pada tahun 1999 dan 2000 tentang perlunya

diberikan status Otonomi Khusus untuk Provinsi Irian Jaya. Nantinya sebagai tahapan awal dalam membangun kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, selain itu juga merupakan Langkah yang strategis dalam menciptakan rangka dasar untuk berbagai upaya dalam penyelesaian permasalahan di Provinsi Papua. Maka dari itu pada tahun 2001 diberikanlah status Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua, yang disahkan pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4151) lalu kemudian terjadi perubahan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 yang

juga mengatur tentang kewenangan bagi Papua dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus, sehingga dapat menjamin keberlangsungan pemberian dana tersebut bagi Papua, yang selama dua puluh tahun telah berjalan, selain itu demi percepatan proses pembangunan dan peningkatan pemerataan pembangunan di wilayah Papua (Nurmasari & Hafis, 2019). Maka dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tersebut juga terdapat perubahan pada beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 terutam sekali tentang Otonomi Khusus Bagi Papua dan adanya penambahan materi baru dalam hal penyesuaian dengan kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang telah berkembang di masyarakat Papua.

Otonomi Khusus dilatarbelakangi oleh adanya isu tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua yang masih belum sepenuhnya mengutamakan keadilan dan kesejahteraan rakyat, penegakan hukum yang baik, dan rasa kurangnya rasa saling menghormati terhadap hak asasi manusia (HAM), khususnya bagi penduduk asli Papua, sehingga permodalan dan pemanfaatan sumber daya alam Provinsi Papua belum bisa dimanfaatkan secara maksimial guna peningkatan kesejahteraan masyarakat pribumi yang menyebabkan terjadinya konflik antara Provinsi Papua dengan daerah lain (Rohim, 2015).

Dari berbagai masalah di atas maka timbul kesadaran masyarakat Papua yang secara demokratis dan konstitusional ingin memperjuangkan pengakuan hak-hak dasar mereka, selain itu juga menuntut tentang penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pelanggaran dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi pribumi. Tuntutan tersebut berlandaskan nilai-nilai sosial yang meliputi perlindungan dan penghormatan terhadap etika dan moral, hak dasar penduduk Papua, hak asasi manusia (HAM), hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan hak dan kewajiban bangsa Indonesia. Sehingga pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lainnya di Indonesia, serta adanya peningkatan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua (Sekjen dan BK DPR RI, 2020).

Sebagai implementasi dari otonomi khusus Papua menurut Undang-undang No 2 Tahun 2021, Papua memiliki kewenangan eksklusif di bidang politik dan perbendaharaan. Di sektor perbendaharaan, Papua tidak hanya mendapat dana perimbangan, tetapi juga pendapatan daerah dalam rangka Otonomi Khusus. Dana Otsus adalah Pos Penerimaan Khusus dalam hal pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya adalah 2% dari Pagu Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional selama periode 25 tahun. Dana tersebut terutama akan ditujukan kepada pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Penyaluran Dana

Otsus tersebut nantinya diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Papua, serta dalam rangka mewujudkan keadilan dalam hal pengelolaan produk daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (Widjojo & Budiatri, 2016).

Dana otonomi khusus Papua meningkat setiap tahunnya, dan menjadi komponen terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua. Menurut Kementerian Dalam Negeri RI Berdasarkan data yang disampaikan, pada tahun 2020 63,79% dari APBD Provinsi Papua berasal dari dana Otonomi Khusus. Lalu, pemerintah melanjutkan dana otsus yang terkait dengan pembangunan dan kesejahteraan penduduk Papua yang masih belum optimal (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020).

Meskipun dana otonomi khusus telah berjalan selama dua puluh tahun dan terjadi peningkatan setiap tahunnya, namun masih berbanding terbalik dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih rendah dari rata-rata IPM nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2021, IPM Provinsi Papua pada tahun 2020 sebesar 60,44%, sedangkan IPM Papua Barat sebesar 65,09%. Sedangkan IPM nasional pada tahun 2020 sebesar 71,94%. Sejalan dengan rendahnya IPM, angka kemiskinan di Papua masih dikategorikan tertinggi di Indonesia (Jayani, 2021). Menurut Badan Pusat Statistik

(BPS), kemiskinan di Papua mencapai 26,86% atau 921 ribu jiwa dari total penduduk, artinya sangat tinggi dibandingkan angka kemiskinan nasional yang 10,14% pada Maret 2021. Hal ini tentu menjadi pertanyaan, Papua dengan Otonomi khusus menjadikan provinsi yang memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terbesar di Indonesia, namun dinilai belum berdampak besar bagi kehidupan masyarakat di Papua, padahal harapannya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dalam perwujudan keadilan sebagai konsep pengelolaan produk daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan untuk pemberdayaan sumber daya manusia khususnya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Papua (Badan Pusat Statistik, 2021).

Berdasarkan fenomena tersebut kami tertarik untuk mengkaji apakah dana otsus secara signifikan mengurangi jumlah penduduk miskin di Papua dengan penelitian yang berjudul “Implikasi Dana Otsus Dalam Mengurangi Kemiskinan di Papua: Dengan Error Correction Model (ECM)”.

TINJAUAN PUSTAKA

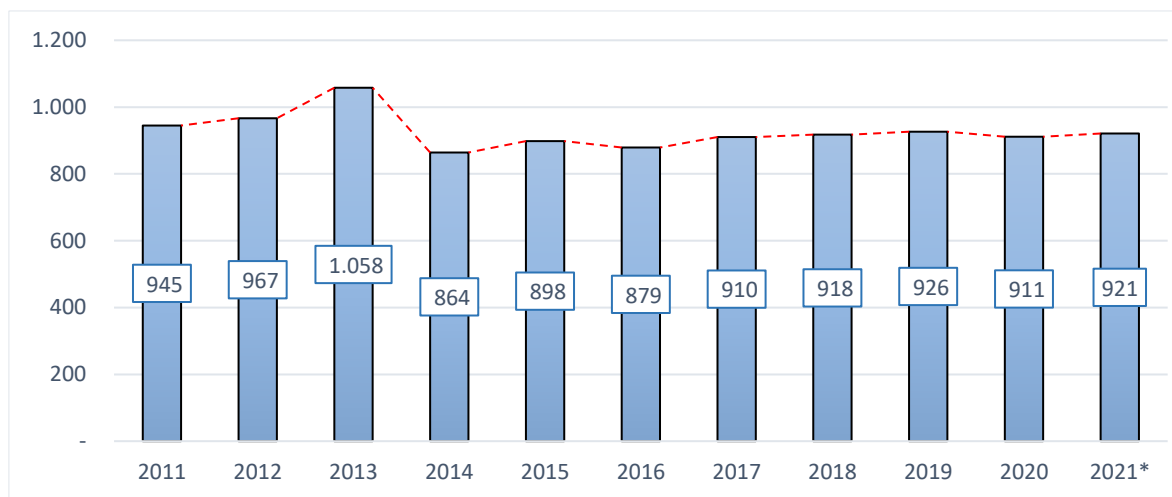
Kemiskinan di Papua

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita bulanan di bawah Garis Kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan menggunakan konsep atau pendekatan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Dengan konsep

tersebut, maka kemiskinan akan dipandang sebagai ketidakberdayaan ekonomi seseorang dalam pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan dan non-pangan yang diukur dari sisi outputnya. Angka kemiskinan Papua masih berada pada kategori yang tinggi untuk wilayah Indonesia. Menurut Badan Pusat

Statistik (BPS), kemiskinan di Papua mencapai 26,86% atau 921 ribu jiwa dari total penduduk, yang berarti sangat tinggi dibandingkan angka kemiskinan nasional 10,14% pada Maret 2021 (Badan Pusat Statistik, 2021).

Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin di Papua 2011-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Dari Gambar 1. diatas, Jumlah Penduduk Miskin Papua dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 fluktuatif, pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin di Papua mulai turun menjadi 864 ribu, namun naik lagi menjadi 910 ribu pada tahun 2017, dan tidak turun di bawah 900 ribu. dalam lima tahun terakhir. Kemudian kemiskinan di Papua mencapai 26,86% atau 921 ribu jiwa dari total penduduk, yang berarti sangat tinggi dibandingkan angka kemiskinan nasional sebesar 10,14% pada Maret 2021.

Dana Otonomi Khusus Papua

Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan Otonomi Khusus terutama bagi Provinsi Papua, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang serta perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang kemudian diubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 yang mengatur tentang Kewenangan Provinsi Papua dalam menyelenggarakan Otonomi Khusus dan menjamin keberlangsungan pemberian dana

Otsus bagi Papua (BPK, 2021). Dengan besaran 2 persen dari porsi dana alokasi umum nasional. Peningkatan dana otonomi khusus untuk Papua dalam satu dekade terakhir dapat terlihat pada Tabel 1. di bawah:

Tabel 1. Peningkatan Dana Otsus Papua 2011-2020

Tahun	Dana Otonomi Khusus Papua (dalam Triliun Rupiah)
2011	3,157
2012	3,833
2013	4,356
2014	4,777
2015	4,940
2016	5,395
2017	5,616
2018	5,580
2019	5,808
2020	5,901

Sumber: BPKAD Papua

Dari Tabel 1. di atas, dana otsus hampir meningkat dari tahun 2011 hingga 2020, rata-rata kenaikannya sebesar 7%. Dana Otsus terbukti mengurangi kemiskinan jika dikelola dengan baik. Menurut Monika & Purnamadewi (2018) dampak dari Dana Otsus terhadap kemiskinan di Papua selama periode penelitiannya mengguna analisis regresi data panel menunjukkan bahwasanya Dana Otsus berdampak signifikan dan negatif terhadap kemiskinan, begitu pula halnya dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat tenaga kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga

berdampak signifikan dan negatif terhadap kemiskinan di Papua.

Berbeda dengan hasil penelitian Luthfi (2012) menggunakan metode kuantitatif mencari dampak APBD Aceh dari Dana Bagi Hasil Migas Otsus terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Aceh Menemukan fakta yang meningkat signifikan sejak tahun 2009 tidak diikuti dengan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun tingkat pengangguran telah berkurang. Sedangkan Alfiady & Dewi (2019) juga melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana informasi digali sedalam mungkin dari sumber yang kredibel dan relevan menemukan bahwa secara praktis, dana otsus dapat mengatasi masalah disintegrasi, namun otsus belum mampu menjawab secara substansial masalah, yaitu penanganan kemiskinan secara mutlak.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan beberapa penelitian sebelumnya, kami tertarik untuk menganalisis dampak dana otsus terhadap penanggulangan kemiskinan di Papua. dapat dirumuskan dengan menggunakan hipotesis komparatif sebagai berikut:

H0 : Tidak ada dampak yang signifikan antara Dana Otsus terhadap Jumlah Kemiskinan di Papua.

H1 : Adanya dampak yang signifikan antara Dana Otsus terhadap Jumlah Kemiskinan di Papua.

Dalam studi ini, kami berasumsi bahwa dana otsus dialokasikan sepenuhnya, dan

didistribusikan secara merata kepada Masyarakat Provinsi Papua, sehingga kami dapat mengetahui seberapa besar dampak dana otsus terhadap jumlah kemiskinan di Papua.

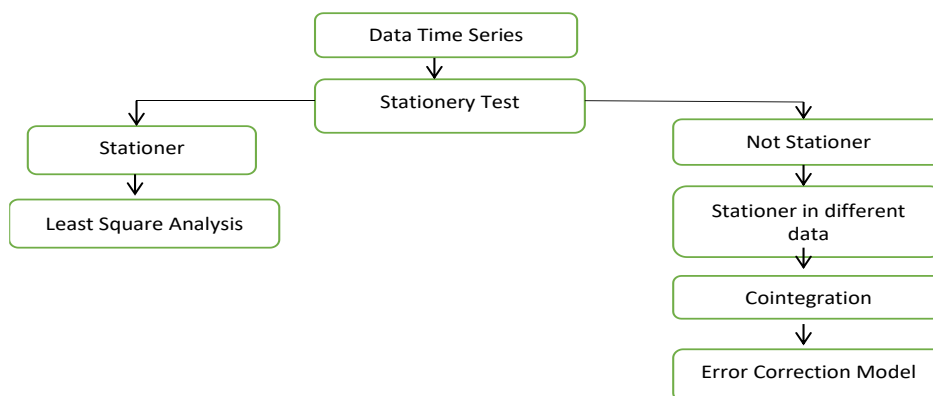
METODE

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Dimama, metode ini sistematis dan menggunakan model matematika. Dalam studi ini, kami akan mengkaji dampak dana otsus (variabel independent/ bebas) terhadap pengentasan kemiskinan (variabel dependen/ terikat) di Papua. Menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Indonesia, dan Kementerian Perbendaharaan Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari tahun 2003 hingga 2020. Kami menggunakan data dana otonomi khusus Papua per kapita, dan data jumlah penduduk miskin di Papua.

Jenis data yang digunakan adalah time series dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2020 yang akan diregresikan dengan Ordinary Least Square. Untuk mengimplementasikan Ordinary Least Square, uji stasioneritas merupakan langkah penting yang harus dilakukan. Stasioneritas merupakan hukum probabilitas yang mensyaratkan bahwa proses tidak berubah dari waktu ke waktu, atau dengan kata lain terjadi proses yang berada dalam keadaan ekuilibrium statistik (Cryer & Jonathan, 1986). Uji Stasioner pada penelitian ini adalah untuk menguji kondisi apakah data yang akan digunakan stasioner atau tidak. Tahapan yang dapat dilakukan adalah dengan Uji Augmented Dickey Fuller (ADF) kemudian dilanjutkan dengan Uji kointegrasi. Apabila variabel yang digunakan tidak stasioner, maka penelitian tidak dapat dilanjutkan menggunakan analisa Ordinary Least Square (OLS), sehingga harus menggunakan Analisa Error Corection Model

Gambar 2. Tahapan Analisis Data Time Series



Metode Analisis Data

(ECM). Stasioneritas data akan diketahui setelah melakukan Uji Unit Root (untuk

menguji apakah data tersebut memiliki kesalahan yang konstan, tidak terpengaruh oleh waktu dan variabel lainnya). Uji Stasioneritas Secara historis, proses stasioner memainkan peran penting dalam analisis deret waktu

Dalam model regresi berganda untuk data time series, perlu diasumsikan bahwa variabel yang diteliti stasioner. Stasioner yang dimaksud adalah kondisi sebaran data dpada nilai rata-rata yang konstan dan tidak bergantung pada waktu (Wooldbridge & Jeffrey, 2012). Untuk menentukan stasioneritas data deret waktu, kami menggunakan uji akar unit yang disebut Uji Augmented Dickey-Fuller.

$$\text{LnY} = f(\text{Lnots}) \dots\dots\dots(1)$$

$$\text{LnY} = \alpha + \text{LnOts} \dots\dots\dots(2)$$

Dimana LnY : Jumlah Kemiskinan di Papua dalam jumlah penduduk.
LnOts : Dana Otsus per kapita.

Tabel 2. Uji Unit Roots untuk Variabel Jumlah Kemiskinan di Papua

Dickey-Fuller test for unit root		Number of obs = 17		
Test Statistic	----- Interpolated Dickey-Fuller -----			
	1% Critical Value	5% Critical Value	10% Critical Value	
Z(t)	-2.174	-3.750	-3.000	-2.630

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.2158

Tabel 3. Uji Unit Roots untuk Variabel Dana Otsus

Dickey-Fuller test for unit root		Number of obs = 17		
Test Statistic	----- Interpolated Dickey-Fuller -----			
	1% Critical Value	5% Critical Value	10% Critical Value	
Z(t)	-1.762	-3.750	-3.000	-2.630

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.3995

Berdasarkan literatur dan penelitian sebelumnya, model penelitian ini adalah:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Stasioner

Penggunaan data deret waktu memerlukan pengujian stasioneritas data. Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui stasioneritas data adalah uji akar unit, dimana pengujiannya menggunakan metode uji Dickey-Fuller dengan melihat nilai probabilitas pada level alpha. Jika MacKinnon memperkirakan nilai p untuk Z(t) kurang dari alfa 0,05 berarti data tersebut stasioner pada level.

Hasil uji unit roots pada level dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Kemudian kita lanjutkan pengujian unit root pada perbedaan pertama. Hasil uji unit root pada first difference dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Dari Tabel 4. dan Tabel. 5 dapat dilihat p-value Variabel Angka Kemiskinan di Papua adalah $0,0000 < 0,05$, dan p-value Variabel Dana Otsus adalah $0,0082 < 0,05$ sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa baik Variabel Jumlah Kemiskinan di Papua maupun Dana Otsus sama-sama stasioner di first difference.

Tabel 4. Uji Unit Roots untuk Variabel Jumlah Kemiskinan di Papua pada first difference

Dickey-Fuller test for unit root		Number of obs = 16		
Test Statistic	----- 1% Critical Value	Interpolated Dickey-Fuller 5% Critical Value	----- 10% Critical Value	
Z (t)	-6.293	-3.750	-3.000	-2.630
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000				

Tabel 5. Uji Unit Roots untuk Variabel Dana Otsus pada first difference

Dickey-Fuller test for unit root		Number of obs = 16		
Test Statistic	----- 1% Critical Value	Interpolated Dickey-Fuller 5% Critical Value	----- 10% Critical Value	
Z (t)	-3.492	-3.750	-3.000	-2.630
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0082				

Dari Tabel 2. dan Tabel 3. kita dapat melihat nilai p perkiraan MacKinnon untuk Z(t) keduanya lebih besar dari alpha 0,05. Variabel p-value Jumlah Kemiskinan di Papua adalah $0,2158 > 0,05$, dan p-value Variabel Dana Otsus adalah $0,3995 > 0,05$ sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa baik Variabel Jumlah Kemiskinan di Papua maupun Dana Otsus tidak stasioner.

Uji Kointegrasi

Setelah data yang akan digunakan harus diintegrasikan terlebih dahulu dengan perbedaan yang sama, langkah selanjutnya adalah melakukan uji kointegrasi. Hasil uji kointegrasi diperoleh dengan membentuk residual yang diperoleh dengan meregresikan variabel bebas menjadi variabel terikat dengan menggunakan uji Engle-Granger

untuk kointegrasi, hasil residualnya adalah pada tabel 6 di bawah ini:

Dari Tabel 6. diperoleh bahwa variabel residual yang merupakan kombinasi linier dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini bersifat stasioner, hal ini

Model. Model regresi Error-Correction Model ditunjukkan di bawah ini:

Persamaan jangka Panjang,

$$\text{LnY} = \alpha + \text{LnOts} \dots \dots \dots (3)$$

Persamaan jangka Pendek,

$$\text{DLnY} = \alpha + \text{DLnOts} + \text{ect}(-1) \dots \dots \dots (4)$$

Tabel 6. Uji Engle-Granger untuk kointegrasi

Engle-Granger test for cointegration		N (1st step) = 18		N (test) = 17		
	Test Statistic	1% Critical Value	5% Critical Value	10% Critical Value		
Z(t)	-3.938	-4.619	-3.719	-3.303		
Critical values from MacKinnon (1990, 2010)						
Engle-Granger 1st-step regression						
Y	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
ots	-.2722774	.0453293	-6.01	0.000	-.3683712	-.1761837
_cons	17.61128	.6377823	27.61	0.000	16.25924	18.96332
Engle-Granger test regression						
D._egresid	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
_egresid						
L1.	-1.013482	.2573672	-3.94	0.001	-1.559076	-.4678876

dikarenakan nilai hitung absolut PP untuk setiap variabel lebih besar dari nilai kritis absolut dari MacKinnon pada 0,05. Hal ini menunjukkan, variabel LnY dan Lnots terkointegrasi atau terdapat keseimbangan jangka panjang antara LnY dan LnOts.

Dimana, DLnY : Jumlah Kemiskinan di Papua dalam jumlah penduduk. (First Difference)
 DLnOts : Dana Otsus per kapita. (First Difference)
 ect(-1) : Error Correction Term

Regresi Model Koreksi Kesalahan

Pada uji kointegrasi didapatkan bahwa variabel LnY dan LnOts terkointegrasi atau terdapat keseimbangan jangka panjang antara LnY dan LnOts. Sehingga kita dapat melanjutkan ke regresi Error-Correction

Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan Error Correction Model (ECM) memperlihatkan pada jangka pendek dan jangka panjang variabel yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap Angka Kemiskinan di Papua.

Dari tabel 6 dan 7, kita dapat membuat persamaan jangka panjang dan jangka pendek:

Persamaan jangka Panjang,

$$\ln Y = 17.61128 - 0.27227 \ln \text{ots} \dots \dots \dots (5)$$

Persamaan jangka Pendek,

$$D.Y = -0.0028245 - 0.1937399 D \ln \text{ots} - 1.009644 \text{ect}(-1) \dots \dots \dots (6)$$

Hasil estimasi dari analisis Error Correction Model ECM di atas memperlihatkan pada jangka pendek dan jangka panjang variabel yang terdapat pada penelitian berpengaruh yang signifikan terhadap Angka Kemiskinan di Papua. Terlihat bahwa nilai p untuk Dana Otsus adalah 0,000 dalam jangka panjang, dan 0,0300 dalam jangka pendek yang berarti

Tabel 7. Model Koreksi Kesalahan Regresi

Long run regression

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	18
Model	.054106144	1	.054106144	F(1, 16)	=	36.08
Residual	.023993872	16	.001499617	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.6928
				Adj R-squared	=	0.6736
Total	.078100016	17	.004594119	Root MSE	=	.03872

Y	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
ots	-.2722774	.0453293	-6.01	0.000	-.3683712 - .1761837
_cons	17.61128	.6377823	27.61	0.000	16.25924 18.96332

Short run regression

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	17
Model	.031672428	2	.015836214	F(2, 14)	=	10.03
Residual	.022114743	14	.001579625	Prob > F	=	0.0020
				R-squared	=	0.5888
				Adj R-squared	=	0.5301
Total	.053787171	16	.003361698	Root MSE	=	.03974

D.Y	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
ots					
D1.	-.1937399	.0801309	-2.42	0.030	-.3656035 - .0218763
ect					
L1.	-1.009644	.2666484	-3.79	0.002	-1.581548 - .4377403
_cons	-.0028245	.0098281	-0.29	0.778	-.0239037 .0182547

Regresi pada tabel 7 di bawah menunjukkan bahwa nilai koefisien Error Correction Model (ECM) jangka panjang dan jangka pendek (dst) dalam model adalah -1.0096 dengan p-value 0,002 lebih kecil dari 0,05. Artinya ect signifikan dan berpengaruh negatif terhadap pendugaan Angka Kemiskinan di Papua.

lebih kecil dari nilai alpha 5%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Otsus berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Kemiskinan di Papua. Sedangkan dari Prob (F-statistik) dalam jangka panjang nilai regresi $0,000 < 0,05$, begitu juga Prob (F-statistic) dalam jangka pendek adalah $0,00020 < 0,05$ maka 1 diterima dan dapat

disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berdasarkan regresi jangka pendek nilai R^2 sebesar 0,5888 atau dapat dikatakan bahwa variabel bebas yang dimasukkan dalam model berpengaruh sebesar 58,8% terhadap variabel terikat, dan dalam jangka panjang nilai R^2 sebesar 0,6928 dapat dikatakan bahwa variabel bebas termasuk dalam pengaruh model 69,28%.

Asumsi Gauss-Markov

Selain itu, pengujian Asumsi Gauss-Markov juga dilakukan pada asumsi heteroskedastisitas dan tidak adanya kolinearitas. Jika salah satu asumsi tidak terpenuhi, maka hasil estimasi ECM tidak efisien untuk digunakan.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk Uji Heteroskedastisitas kami menggunakan uji Breusch-Pagan/Cook-Weisberg untuk heteroskedastisitas, Hasil uji Breusch-Pagan/Cook-Weisberg untuk heteroskedastisitas, ditunjukkan pada nilai di bawah ini:

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity

Ho: Constant variance

Variables: fitted values of D.Y

chi2(1) = 0.58

Prob > chi2 = 0.4467

Dari nilai diatas nilai probabilitas variabel semakin besar nilai χ^2 , berarti H_0 diterima atau terdapat variabel Konstan (Homokedastisitas).

Uji Multikolinearitas

Untuk memeriksa tidak ada korelasi serial, kami menggunakan uji LM Breusch-Godfrey. Hasil pengujian ada pada tabel 9 di bawah ini:

Pengujian Breusch-Godfrey LM di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari nilai χ^2 ($0,2473 > 1,338$) artinya H_0 diterima atau tidak ada korelasi serial.

Analisis Dana Otsus Terhadap Jumlah Kemiskinan di Papua

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan Error Correction Model (ECM), diperoleh hasil yaitu dalam jangka pendek dan juga jangka Panjang, bahwasanya variabel yang terdapat pada penelitian berpengaruh yang signifikan terhadap angka kemiskinan di Papua. Dari persamaan (5) dapat dianalisis bahwa dalam jangka Panjang, variabel Dana Otsus berpengaruh signifikan terhadap

Tabel 9. Uji Breusch-Godfrey LM

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation			
lags (p)	chi2	df	Prob > chi2
1	1.338	1	0.2473

H0: no serial correlation

Jumlah Kemiskinan di Papua. Nilai koefisien Dana Otsus sebesar -0,2722 yang artinya variabel Dana Otsus berpengaruh negatif terhadap Jumlah Kemiskinan di Papua, sehingga menjelaskan dalam jangka panjang ketika nilai Dana Otsus per kapita meningkat 1 juta Rupiah, Angka Kemiskinan di Papua akan berkurang sebesar 0,27 juta orang.

Demikian pula dalam jangka pendek, dari persamaan 6 variabel Dana Otsus berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Kemiskinan di Papua. Nilai koefisien Dana Otsus sebesar -0,19373 yang artinya variabel Dana Otsus berpengaruh negatif terhadap Jumlah Kemiskinan di Papua, sehingga menjelaskan dalam jangka pendek ketika nilai Dana Otsus per kapita meningkat 1 juta, Angka Kemiskinan di Papua akan berkurang sebesar 0,19 juta. Hasil ini sama dengan penelitian sebelumnya oleh Monika & Purnamadewi (2018) yang mencari Dampak Dana Otsus terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua. Dimana hasil analisis regresi menggunakan data panel menunjukkan bahwa Dana Otsus memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan.

Penulis harus menjelaskan hasil penelitian (apa yang ditemukan) secara rinci. Bagian

hasil penelitian dan diskusi berisi hasil temuan penelitian dan analisis. Temuan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan harus ditulis dengan dukungan tambahan dari data yang memadai. Hasil dan analisis penelitian harus dapat menyelesaikan atau memberikan penjelasan untuk pertanyaan yang dinyatakan dalam pendahuluan. (12pt, 1.15 lines spacing).

PENUTUP

Selama masa penelitian dengan asumsi dana otsus tersalurkan sepenuhnya, dan merata kepada seluruh masyarakat Papua, berdasarkan hasil estimasi dengan Error Correction Model (ECM), memperlihatkan bahwasanya pada jangka pendek dan juga jangka panjang variabel yang terdapat pada penelitian memiliki berpengaruh signifikan terhadap Angka Kemiskinan di Papua. Dalam jangka panjang ketika nilai Dana Otsus per kapita meningkat 1 juta Rupiah, Jumlah Kemiskinan di Papua akan berkurang sebesar 0,27 juta orang. Sementara dalam jangka pendek ketika nilai Dana Otsus per kapita meningkat 1 juta, Angka Kemiskinan di Papua akan berkurang sebesar 0,19 juta.

Dari hasil penelitian ini kami menyarankan bahwa dana otsus sangat

membantu dalam pengentasan kemiskinan jika dana tersebut benar-benar diterima oleh seluruh masyarakat Papua khususnya untuk pendidikan dan kesehatan sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang.

Besarnya dana otsus yang dikucurkan pemerintah pusat kepada Provinsi Papua merupakan upaya dalam proses pemerataan pembangunan, akan tetapi permasalahan kemiskinan di Papua teratasi dengan baik. Pertanyaannya adalah Dimana anggaran yang tersedia sehingga masih belum bisa mengatasi permasalahan ini? Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono, dalam Nurmasari & Raden, (2019) mengatakan bahwasanya Dana Otsus Papua yang seharusnya dialokasikan untuk bidang pendidikan dan kesehatan, malah disalahgunakan untuk kegiatan lain. yang tidak menjadi prioritas daerah. Sekretaris Jendral dan Badan Komisararis DPR RI dalam penelitiannya juga menemukan adanya masalah terkait dengan akuntabilitas pada pelaksanaan Dana Otonomi Khusus tersebut. Pemerintah Kabupaten dan Kota di Papua dan Papua Barat tidak memberikan laporan transparansi kinerja pelaksanaan dana otsus pada setiap periode dalam pencairan dana otsus. Laporan yang diberikan umumnya hanya berupa realisasi fisik dan keuangan. Dan laporan tersebut tidak pernah menjadi bahan pertimbangan dalam pencairan periode berikutnya. Sangat wajar jika kebanyakan

orang berpikir bahwa triliunan anggaran yang diberikan kepada Papua telah dikorupsi. bukan untuk meningkatkan kesejahteraan orang Papua melalui pendidikan atau kesehatan (Sekjen dan BK DPR RI, 2020).

Terakhir, kami sangat menyarankan kepada khususnya pemerintah pusat sebagai pemberi kuasa, bahwa harus diberlakukan mekanisme control dan evaluasi yang cukup ketat terhadap penggunaan anggaran Otonomi Khusus di Papua. Selain itu agar dapat memberantas kasus korupsi secara masif di Papua, agar anggaran tersebut dapat digunakan sesuai dengan fungsinya yaitu untuk mensejahterakan rakyat. Sehingga, pada akhirnya permasalahan kemiskinan dan yang lainnya dapat teratasi dengan baik.

REFERENSI

- Alfiady, T., & Dewi, R. (2019). *OTONOMI KHUSUS DAN KEMISKINAN DI ACEH: Gambaran Kemiskinan Pelaku Usaha Batu Bata di Desa Ulee Pulo Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara*. 9(1), 38–60.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Kemiskinan dan ketimpangan*. <https://www.bps.go.id/>.
- Baharudin. (2016). Desain Daerah Khusus/Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45(No.2), 85–92. <https://media.neliti.com/media/publications/156798-ID-desain-daerah-khusus-istimewa-dalam-sist.pdf>
- BPK. (2021). *Pendapat BPK: Pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada Provinsi Papua dan Papua Barat 2021*.
- Cryer, & Jonathan, D. (1986). *Time Series Analysis*. Duxbury Press.cry.

- Jayani, D. H. (2021). Skor Indeks Pembangunan Manusia Papua Menurun pada 2020. [https://databoks.katadata.co.id/databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/22/skor-indeks-pembangunan-manusia-papua-menurun-pada-2020](https://databoks.katadata.co.id/databoks/katadata.co.id/datapublish/2021/09/22/skor-indeks-pembangunan-manusia-papua-menurun-pada-2020)
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2020). *Hasil penyelarasan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*.
- Luthfi, A. (2012). Impact of Aceh's Additional Budget from Special Autonomy Oil-Gas Revenue Sharing Fund to Poverty Reduction in Aceh. *ICAIOS's Journal*.
- Monika, & Purnamadewi, Y. L. (2018). Dampak Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua Periode 2010-2016. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/96328>
- Nurmasari, & Hafis, R. I. Al. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan Ditengah Kelimpahan Otonomi Khusus Papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180–1192.
- Nurmasari, & Raden. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan Ditengah Kelimpahan Otonomi Khusus Papua. *Jurnal.Untag-Sby*. <http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/jpap/article/view/2953>
- Rohim, N. (2015). Optimalisasi Otonomi Khusus Papua Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik Dan Kekerasan. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 80–100. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8n01.289>
- Sekjen dan BK DPR RI. (2020). *Akuntabilitas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat*.
- Widjojo, M. S., & Budiatri, A. P. (2016). UU Otonomi Khusus bagi Papua: Masalah Legitimasi dan Kemauan Politik. *Jurnal Penelitian Politik*, 9(1), 22.
- Wooldbridge, & Jeffrey, M. (2012). *Introductory Econometrics*. Michigan State University.